

EDITORIAL

Para 'Tercela'
di Panggung Golkar

Dagelan politik yang ditampilkan Partai Golkar tak berhenti di Bali. Setelah dalam musyawarah nasional luar biasa mereka memilih ketua umum yang integritasnya penuh catatan belang, kini muncul daftar nama bermasalah yang disebut-sebut akan masuk menjadi pengurus partai. Jika nama-nama itu benar terpilih, semakin sulit bagi Golkar untuk memperbaiki citra negatifnya selama ini.

Beberapa mantan narapidana korupsi, seperti Nurdin Halid dan Fahd El Fouz A Rafiq, terlihat memegang posisi kunci. Ada pula nama Sigit Haryo Wibisono, yang disebut akan dipilih menjadi Ketua Pemenang Pemilu Wilayah Jawa Timur. Sigit adalah terpidana dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnain. Dia dihukum 15 tahun penjara. Sejumlah nama lain tercatat sebagai tersangka kasus korupsi yang sedang berjalan.

Kalau mereka benar menjadi pengurus partai, Golkar telah melanggar aturannya sendiri. Menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, ada pakem dan aturan dalam menentukan kader untuk menduduki posisi di kepengurusan partai yang harus dipatuhi. Golkar mencantumkan asas PDLT—singkatan dari prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tak tercela—sebagai kriteria penyaring.

Apakah pemimpin baru Golkar menganggap koruptor dan orang yang terlibat dalam pembunuhan bukan orang tercela? Jika jawabannya "ya," konstituen Golkar semestinya mengoreksi partai ini. Mereka harus mengkaji ulang, apakah tetap layak mendukung Golkar atau sebaliknya: menempatkan mereka sebagai tak lebih dari warisan rezim masa lalu yang akan terus-menerus menjadi beban.

Para kader partai yang masih cukup waras dan punya martabat harus pula angkat bicara. Menerima dan masuk kepengurusan bersama orang-orang tercela itu sama saja dengan merendahkan diri dan menjadi setara dengan mereka. Rakyat, yang kini jauh lebih cerdas, tentu akan mencatat dan menganggotai bahwa partai semacam ini tak boleh dicoblos lagi dalam pemilihan umum mendatang.

Yang akan ikut tercoreng kemudian adalah wajah pemerintahan Jokowi-Kalla. Pesan yang tampil dalam sandiwara musyawarah di Bali begitu gamblang: ada restu Istana di balik terpilihnya Setya Novanto. Ada barter politik di sana. Novanto memastikan dukungan Golkar kepada pemerintah, dan beberapa kursi menteri mungkin akan menjadi jatah mereka.

Dan sampai di sini, kita boleh risau akan skenario berikutnya yang bisa saja terjadi: bagaimana jika orang-orang bermasalah itu, sebagai imbalan karena dukungan partainya ke pemerintah, terpilih sebagai menteri atau pejabat?

Adalah urusan internal Golkar untuk memilih siapa yang menjadi pengurusnya. Tapi, ketika Golkar berkoalisi dengan pemerintah, dan orang-orang bermasalah di sana ikut menentukan kebijakan publik, khalayaklah yang akan dirugikan. ●



VISHNU JUWONO

DOSEN FAKULTAS
ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS INDONESIA

Pada Mei lalu, majalah terkemuka Inggris, *The Economist*, merilis Indeks Kapitalis Kroni, indeks yang pertama kali diperkenalkan pada 2014 sebagai alat analisis untuk melihat apakah kehidupan rakyat dari negara atau kota tertentu dengan ekonomi kapitalis mudah dipengaruhi kapitalisme kroni.

Berbeda dengan indeks-indeks lain yang lebih fokus pada perbandingan kualitas dari tata kelola serta tingkat korupsi antar-negara, Indeks Kapitalis Kroni mencoba mengukur perbandingan antara kekayaan para pengusaha miliarder yang jenis usahanya bersifat pemburu rente (*rent-seeking*) dan tingkat produksi domestik bruto (PDB) suatu negara.

Istilah "pemburu rente" diperkenalkan pertama kali pada 1974 oleh ekonom terkemuka Anne Krueger dalam artikel akademiknya yang terkenal, "The Political Economy of Rent-Seeking Society". Definisi lebih tajam lagi dijelaskan oleh ekonom pemenang Nobel tahun 2013, Robert Shiller (2013), bahwa pemburu rente merupakan kegiatan ekonomi yang

Dalam Cengkeraman
Kapitalis Kroni

tidak menyumbang produktivitas kepada masyarakat sekitarnya, melainkan lebih demi keuntungan diri dan usahanya dengan cara mengoleksi rente/pungutan dari aset yang diperolehnya melalui manipulasi sosial.

Sektor industri rentan terhadap kegiatan pemburu rente karena interaksinya yang cukup intens dengan pemerintah. Yang juga rentan adalah sektor yang memperoleh lisensi dari pemerintah, seperti telekomunikasi, sumber daya alam, dan properti/konstruksi. Walaupun sebagian besar jenis usaha ini secara hukum legal, potensi korupsi amat besar.

Indeks Kapitalis Kroni ini disusun berdasarkan data terbaru dari majalah *Forbes* mengenai kekayaan para miliarder di seluruh dunia yang kegiatan bisnisnya lebih banyak dalam sektor yang rentan terhadap praktek pemburu rente. Indeks ini mencoba mengukur potensi korupsi kelas kakap, yang umumnya berpengaruh terhadap kebijakan publik dan mempunyai dampak besar terhadap masyarakat, bukan korupsi kecil-kecilan.

Hasilnya, indeks tersebut berhasil mengidentifikasi 22 negara dengan Rusia menempati urutan pertama sebagai negara dengan potensi kapitalis kroni terbesar dengan proporsi kekayaan miliarder dari

sektor kroni kurang-lebih 15 persen dari PDB.

Sedangkan Jerman relatif bersih dari sektor kroni dengan menempati urutan terakhir dengan proporsi kekayaan miliarder kroni kurang dari 1

persen PDB.

Bagaimana dengan Indonesia? Ternyata negara-negara berkembang mendominasi daftar negara dengan potensi kapitalis kroni terbesar. Sebanyak 65 persen kekayaan para kroni miliarder justru berasal dari negara-negara tersebut.

Sangat disayangkan bahwa Indonesia menempati *ranking* cukup "tinggi" pada indeks ini, yakni pada urutan ketujuh dengan proporsi kekayaan kroni kurang dari 5 persen PDB. Masuknya Indonesia dalam urutan 10 besar dalam Indeks Kapitalis Kroni ini sebenarnya bukan kejutan bagi kita yang mengalami dinamika politik di Indonesia. Pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan memang belum tuntas.

Indeks ini juga menegaskan bahwa peranan para miliarder kroni di Indonesia masih cukup besar dalam struktur perekonomian negeri ini. Bahkan pengaruh politik mereka lebih besar, yang tidak dapat diidentifikasi oleh indeks ini, karena dia lebih fokus pada kekuatan ekonomi.

Berdasarkan penelitian dari beberapa ahli politik Indonesia terkemuka di masa sesudah tumbanganya Orde Baru, para pengusaha kroni, yang mereka sebut sebagai oligarki, tetap bertahan dan bahkan meningkatkan pengaruhnya secara langsung ataupun tidak langsung dalam politik. Ini dilakukan untuk melindungi dan bahkan meningkatkan kekayaan mereka (Hadiz dan Robison, 2014) (Winters, 2014).

Salah satu instrumen politik utama yang digunakan para pengusaha kroni adalah dengan menguasai partai politik, memanfaatkan kesulitan

pendanaan partai politik (Mietzner, 2013), dan pada akhirnya menguasai mayoritas kursi DPR (ICW, 2015). Mereka juga memanfaatkan sistem penegakan hukum dan birokrasi Indonesia yang relatif korup untuk melancarkan kepentingan bisnis, seperti ditunjukkan dalam kasus wakil menteri, jaksa, dan hakim agung yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima suap dari pengusaha.

Dengan demikian, Indeks Kapitalis Kroni ini menjadi peringatan bagi kita agar menjalankan agenda reformasi tata kelola yang belum tuntas. Pemerintah Presiden Joko Widodo diharapkan dapat mendorong tiga agenda penting reformasi. *Pertama*, mempercepat reformasi birokrasi dengan konsisten melaksanakan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memberdayakan Komisi ASN. *Kedua*, memberikan dukungan politik yang nyata kepada KPK, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan koruptor kakap dan pejabat penegak hukum. *Ketiga*, perbaikan penegakan hukum dengan mendorong reformasi kepolisian dan kejaksaan. Dengan melaksanakan ketiga agenda tersebut, diharapkan ruang pengusaha kapitalis kroni/oligarki dapat dipersempit dalam mengeksploitasi kelemahan sistem tata kelola Indonesia bagi kepentingan ekonominya. ●



TEMPO/INDRA FAUZI

KORAN TEMPO

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Daru Priyambodo
REDAKTUR EKSEKUTIF: Lestantya.R. Baskoro

DEWAN EKSEKUTIF: Arif Zulkifli (Ketua), Daru Priyambodo, Gendur Sudarsono, Yuli Ismartono, Hermien Y. Kleden, Wahyu Muryadi, Budi Setyawan, Burhan Sholikin, Lestantya.R. Baskoro, M. Taufiqurrahman

NASIONAL & HUKUM
REDAKTUR PELAKSANA Setri Yasra
REDAKTUR UTAMA Elik Susanto, Iajang Jamaludin, Widiarsi Agustina, Qaris Tadjudin, REDAKTUR ABDUL MANAN, Anton Aprianto, Agoeng W., Bobby Candra, Istiqomatul Hayati, Sunudiyantoro, STAF REDAKSI Agung Sedayu, Angga Sukma Wijaya, Eko Ari Wibowo, Francisco Rosarians Enga Geken, Ira Guslana Sufa (nonaktif), Istman Musaharun Pramadiba, I Wayan Agus Purmono, Prihandoko, Syailendra Persada, Yuliawati, REDAKTUR Dewi Suci, Husein Abri Y.M., Dongoran, Indra Wijaya, Linda Novi Trianita, Mitra Tarigan, Muhammad Rizki, Tika Primandari, Yolanda Ryan Armindya

EKONOMI & MEDIA
REDAKTUR PELAKSANA Y. Tomi Aryanto, REDAKTUR UTAMA Yandhrie Arvian, REDAKTUR Agus Supriyanto, Efri Nirwan Ritonga, Fery Firmansyah, Grace Samantha Gandhi, Jobpie Sugiaro, Retno Sulistyowati
STAF REDAKSI Abdul Malik, Akbar Tri Kurniawan, Ayu

Prima Sandi, Gustidha Budiartie, Setiawan Adiwijaya
REPORTER Aditya Budiman, Ali Ahmad Noor Hidayat, Andi Ibnu Masri R., Amirullah, Devy Erniss, Khairul Anam, Praga Utama, Robby Irfani, Singgih Soares, Tri Artining Putri

INTERNASIONAL & NUSA
REDAKTUR PELAKSANA Purwanto Setiadi
REDAKTUR UTAMA Dody Hidayat, Idrus F. Shahab, Supto Yunus, REDAKTUR Ali Nur Yasin, Dewi Rina Cahyani, Dwi Arjanto, Endri Kurniawati, Kodrat Setiawati, Maria Hasugian, Mustafa Ismail, Sukma Loppies, Z. Wuragil, STAF REDAKSI Budi Riza, Kelik M. Nugroho, LN. Idayani, Natalia Santi, M. Iqbal Muhtarom, Mahardika Satria, R. Fadri, Sita Planasari, JAWA TIMUR, BALI Zacharias Wuragil (Koordinator Liputan), Endri Kurniawati, Jali Hakim, Zed Abdin
JAWA TENGAH Ali Nur Yasin (Koordinator Liputan), LN. Idayanie, R. Fadri, JAWA BARAT, BANTEN Dewi Rina Cahyani (Koordinator Liputan),
SULAWESI SELATAN Supto Yunus (Koordinator Liputan)

SAINS, SPORT, & KOLOM
REDAKTUR PELAKSANA Yos Rizal Suriaji
REDAKTUR UTAMA Kurniawan, REDAKTUR Hari Prasetyo, Irfan Budiman, Nurdin Saleh, STAF REDAKSI Agus Baharudin, Ahmad Nurhasyim, Dwi Riyanto Agustiari, Erwin Prima Putra Z., Febriyani, Gabriel Wahyu Titiyoga, Gadi Kurniawan Makitan, Martha Warta Silaban, Rina Widiajuti, Tri Suharnan, REDAKTUR Amri Mahbub, Maya Nawangwulan R., Ursula Florene Sonia

METRO & PRELUDE
REDAKTUR PELAKSANA Bagja Hidayat
REDAKTUR Ali Anwar, Juli Hantoro, Nur Haryanto, Niek Indrieta Baiduri, Rini Kustiani, STAF REDAKSI Erwan Hermawan, Suseno, Untung Widianto, REPORTER Afrilia Suryanis, Gangsar Parikesit, Indri Maulidar, Linda Hairani, Ninis Chairunnisa, Putri Adityowati

INVESTIGASI
REDAKTUR PELAKSANA Philipus Parera
REDAKTUR Mustafa Silalahi, Stefanus Teguh Edi Pramono
STAF REDAKSI Rusman Paragbueq
GAYA HIDUP & KORAN TEMPO MINGGU
REDAKTUR PELAKSANA Tulus Wijanarko
REDAKTUR Dwi Wiyana, M. Reza Maulana
STAF REDAKSI Cheta Nilawati Prasetyaningrum, Hadriani Pudjarti, Tito Sianipar, Subkhan
REPORTER Aisha Shaidra, Dini Pramita, Nur Alfiah BT, Tarkhadi, Raymundus Rizang RW

SENI & INTERMEZO
REDAKTUR PELAKSANA Seno Joko Suyono
REDAKTUR Yb. Firman D. Atmakusumah, Nurdin Kalim
STAF REDAKSI Amanda Mustika Megarani, Ananda Wardhana Badudu, Dian Yuliatuti, REPORTER Moyang Kasih Dewi Merdeka
PUSAT PELIPUTAN
KEPALA Wahyu Dhyatnika, REDAKTUR UTAMA Yudono Yanuar, REDAKTUR Anton Septian, Purwanto, Juli Hantoro, Tjandra Dewi, Nunuy Nurhayati, RR. Ariyani

STAF REDAKSI Pingit Arya, Riky Ferdianto, Ananda Theresia, REPORTER Reza Aditya, Faiz Nasrillah
PENGEMBANGAN PRODUK DIGITAL
KEPALA Yosep Suprayogi, REDAKTUR Ngarto Februa
REPORTER Dwi Oktaviane, Ferdinand Akbar, Ryan Maulana

TEMPO ENGLISH
EDITOR Lucas Edward (Tempo English Weekly)
EDITOR KOORDINATOR Purwanti Dhiyah Prabandari
EDITOR SENIOR Ray Hervandi, EDITOR Mahinda Arkiyasa, Petir Garda Bhwana (en-tempo.co)
STAF REDAKSI Sadika Hamid, Isma Savitri, REPORTER Amanda T. Siddharta
KOORDINATOR PRODUKSI Dewi Pusitasari

TV TEMPO
MANAJER PEMBERITAAN Nur Hidayat, PRODUSER EKSEKUTIF Diah Ayu Candra Ningrum

KREATIF, FOTO, BAHASA
REDAKTUR KREATIF Gilang Rahadian, REDAKTUR DESAIN Eko Pungto Pambudi, Fitri Moerat Ramadhan Sitompul, Yuyun Nurachman, DESAINER SENIOR Ewvan Kurniawan, Imam Yunianto, Kendra H. Paramita, DESAINER Aji Yulianto, Ary Setiawan Harahap, Deisy Rikayanti Sastradmodjo, Djunaedi, Edward Ricardo Santuri, Fransisca Hana, Gatot Pandego, Indra Fauzi, Munzir Fadly, Rizal Zulfa
PENATA LETAK Achmad Budy, Agus Darmawan Setiadi, Agus Kurnianto, Ahmad Fatoni, Arief Mudi Handoko, Endang Wijaya, Imam Riyadi Untung, Junianto Prasongko,

Kuswoyo, Lukmanul Hakim, Mistono, Rudy Asrori, Tri Watno Widodo, Wahyu Risyanto
REDAKTUR FOTO Rully Kesuma (Koordinator), Ijar Karim, Mahanizar Djohan, Gunawan Wicaksono, PERISEK FOTO Agung Chandra, Bintari Rahmania, Fardi Bestari, Jati Mahatmaji, Nita Dian Afanti, Rati Purnama Ningsih, Wahyuzal Hermanuaji, FOTOGRAFER Amston Probel (Koordinator), Aditia Noviansyah, Subekti

REDAKTUR BAHASA Uu Suhardi (Koordinator), Hasto Pratikto, Supto Nugroho, STAF SENIOR Iyan Bastian, STAF Aeni Nur Syamsiyah, Edy Sembodo, Hadi Prayuda, Hardian Putra Pratama, Heru Yuliyanti, Michael Timur Kharisma, Mochamad Murwinanto, Raski Darma, Sekar Septandari, Sulud Sudarto

PUSAT DATA DAN ANALISA TEMPO
KOORDINATOR: Priatna, RISET: Indra Mutiara
PUSAT DATA: Dina Andriani, Ismail

REDAKTUR SENIOR Amarnan Loebis, Bambang Harymurti, Edi Rustiadi M., Fikri Jufr, Goenawan Mohamad, Leila S. Chudori, Putu Setia, Toriq Hadad

KEPALA PEMBERITAAN KORPORAT Toriq Hadad
BIRO EKSEKUTIF DAN PENDIDIKAN Lestantya.R. Baskoro (Kepala), Yos Rizal Suriaji, Philipus Parera

ALAMAT REDAKSI Gedung Tempo, Jalan Palmerah Barat No. 8, Jakarta Selatan 12210 Telp. 021-7255625, 3916160, 5482152 Faks. 725-5650 e-mail red@tempo.co.id

SURAT DAN PENDAPAT

(021) 70292900
(021) 725 5645/50
pendapat@tempo.co.id

PANJANG ARTIKEL MAKSIMUM 4500
KARAKTER, DISERTAI FOTO DAN
NOMOR TELEPON. ARTIKEL JUGA
AKAN DIPUBLIKASIKAN ONLINE
DI INDONESIA.TEMPO.CO